



## Pengaruh Pertumbuhan Belanja dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap PDRB Selama Pandemi Covid-19 di Sulawesi Selatan

**Hariany Idris<sup>1</sup>, Samsinar<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Makassar

Email: hariany.idris@unm.ac.id

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh pertumbuhan belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto, dan apakah terdapat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan unit analisis adalah lingkup kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, mulai dari pengumpulan data yang ada hingga observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pertumbuhan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan belanja daerah maka semakin tinggi pula PDRB. Hasil penelitian ini didukung dengan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara, maka jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap perekonomian daerah.

**Kata Kunci:** Kemandirian Keuangan; PDRB; Pertumbuhan Belanja

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator petunjuk adanya pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil diharapkan berperan dalam meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merefleksikan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensi keuangan daerahnya secara mandiri.

Dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan pemerintah di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah

guna meningkatkan pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan-peranan sumber daya ekonomi yang ditujukan untuk menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan daerah maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan dan pelayan pembangunan di wilayah kawasan timur Indonesia. Sebagai daerah otonom Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber pendapatan yang potensial. Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi salah satu wilayah mandiri yang dapat mensejahterakan masyarakatnya serta dapat menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Dalam konteks otonomi daerah saat ini, realisasi belanja operasi sering lebih besar dari pada belanja modal.

Banyaknya manfaat yang diperoleh apabila pelaksanaan belanja modal dapat dilaksanakan secara mandiri ternyata belum mampu dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari pengeluaran untuk belanja operasi lebih besar dari pengeluaran untuk belanja modal.

Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara, maka jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap perekonomian daerah (Darise, 2006).

Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 telah diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini yaitu mengenai belanja daerah. Belanja daerah yang dimaksud sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Belanja daerah dibagi dalam dua bentuk yaitu berdasarkan sifat dan berdasar fungsinya. Berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasar fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta perlindungan sosial.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi (Tarigan, 2012). Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertumbuhan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi), yang secara tidak langsung menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Pertumbuhan wilayah adalah produk dari banyak faktor, sebagian bersifat intern dan sebagian bersifat ekstern. Faktor-faktor yang berasal dari daerah itu sendiri meliputi distribusi faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal. Sedangkan salah satu penentu ekstern yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan daerah tersebut.

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi regional. Tarigan dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Regional* menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi regional terdiri dari teori basis ekspor, teori pertumbuhan jalur cepat, teori pusat pertumbuhan, teori neoklasik, model kumulatif kausatif dan model interregional.

Atas uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan studi mendalam terkait hubungan Pengaruh Pertumbuhan Belanja dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap PDRB Selama Pandemi Covid-19 di Sulawesi Selatan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pertumbuhan belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto? Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif untuk mengetahui efektivitas pertumbuhan belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lingkup kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Estimasi waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan, mulai dari pengumpulan data yang ada hingga observasi langsung di lapangan.

Adapun yang menjadi objek penelitian bertempat di lingkup kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian diperkirakan selama tiga bulan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari studi pustaka dan pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi pendapatan dan belanja serta PDRB yang didapat dari Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan populasi

yang ada, maka dipilih sampel dengan menggunakan data *time series* dan *cross section* atau panel data dari tahun 2019-2021 tentang belanja daerah dan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PDRB dan variabel independen dalam penelitian ini adalah efektivitas pertumbuhan belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah. Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan, maka model yang digunakan adalah model regresi linear berganda.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS, dan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (efektivitas pertumbuhan daerah dan kemandirian keuangan daerah) terhadap variabel dependen (PDRB).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

Analisis kinerja APBD dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Disamping meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, analisis kinerja APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kinerja keuangan yang bersangkutan.

Dari hasil analisis pertumbuhan belanja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 terlihat bahwa ada beberapa daerah yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Barru sebesar 2,1%, Bulukumba sebesar 0,5%, Jeneponto sebesar 3,7%, Luwu sebesar 6,2%, Sidrap sebesar 3,5% dan Pare-Pare sebesar 8%. Hal ini menunjukkan daerah-daerah tersebut dapat melakukan penghematan belanja. Selanjutnya pertumbuhan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dan 2021 pada umumnya mengalami pertumbuhan yang positif.

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Oleh karena itu, otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang telah ada.

Nordiawan (2008) mengemukakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Latar belakang lain adanya transfer dana pusat ke daerah ini antara lain untuk mengatasi ketimpangan

fiskal vertikal (antara pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan fiskal horizontal, serta guna mencapai standar pelayanan untuk masyarakat.

Ketimpangan fiskal horizontal muncul akibat tidak seimbangannya kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan fiskalnya. Dengan kata lain, kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tidak mampu menutupi kebutuhan belanja daerah. Sesuai dengan PP No 55 tahun 2005 pasal (2), Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

Hasil analisis di atas menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2019-2021. Terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi masih sangat rendah yaitu dibawah 25% dengan pola hubungan instruktif. Kecuali Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat kemandirian diatas 25% dengan pola hubungan konsultatif. Pola hubungan ini menggambarkan bahwa campur tangan pemerintah pusat masih dominan.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (revenue), maupun dari sisi pengeluaran (expenditure) agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun total PDRB setiap tahunnya mengalami peningkatan namun pertumbuhan PDRB cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan PDRB

tahun 2012 sebesar 8,08% kemudian pada tahun 2013 turun menjadi 7,74% dan tahun 2014 turun menjadi 7,69%.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda yang merupakan persamaan regresi dengan dua atau lebih variabel untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel diatas disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

- $\text{LnY} = 3,343 + 0,087\text{LnX1} + 0,043\text{LnX2} + \mu$
- $t\text{-hitung} = (1,318), (1,192)$
- $R = 0,375$   $R\text{ Square} = 0,141$   $\text{Adj } R^2 = 0,059$

Uji Statistik

a) *Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)*

Koefisien determinasi merujuk kepada kemampuan dari variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung seberapa besar varian dan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. Nilai R<sup>2</sup> paling besar 1 dan paling kecil 0 ( $0 < R^2 < 1$ ). Bila R<sup>2</sup> sama dengan 0 maka garis regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel dependen, sebab variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi tidak mempunyai pengaruh varian variabel dependen adalah 0.

Dari hasil regresi pengaruh variabel X yaitu efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap PDRB (Y) diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,141 yang menunjukkan bahwa 14,1 dari variasi perubahan PDRB (Y) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel efektivitas pertumbuhan belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah (X). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 85,9 dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang belum dimasukkan dalam model sehingga R<sup>2</sup> sebesar dinyatakan bahwa model valid.

b) *Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)*

Uji statistik-t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Regresi pengaruh variabel efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap PDRB di Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan  $\alpha$ : 10% dan  $df = 24$ , maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,317.

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai t-hitung = 1,192, sehingga diperoleh hasil t-hitung ( $1,192 < t\text{-tabel } (1,317)$ ), maka keputusannya adalah Hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>) ditolak dan Hipotesis nol (H<sub>o</sub>) diterima. Dengan nilai signifikan sebesar 0,54. Hasil dari uji t tersebut menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

c) *Pengujian Signifikansi Simultan (Uji-F)*

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji-f). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Dari hasil regresi pengaruh variabel efektivitas pertumbuhan belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah (X) terhadap PDRB (Y), maka diperoleh f-tabel sebesar 2,95, sedangkan f-statistik sebesar 1,717. Sehingga, f-statistik < f-tabel (1,717 < 2,95). Dengan nilai signifikan sebesar 0,204. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

## **2. Pembahasan**

a. *Pengaruh efektivitas pengelolaan pendapatan daerah terhadap PDRB*

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pertumbuhan belanja daerah berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil koefisien regresi X1 sebesar 0,087 yang berarti bahwa jika X1 (efektivitas pertumbuhan belanja daerah) naik sebesar satu satuan, akan berpengaruh terhadap peningkatan PDRB sebesar 0,087 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Selanjutnya dilihat dari nilai signifikan dimana tingkat signifikan 0,202 serta nilai t-hitung = 1,318 dan t-tabel = 1,317, maka t-hitung > t-tabel (1,318 > 1,317). Maka Hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Dengan kata lain variabel efektivitas pertumbuhan belanja daerah (X1) berpengaruh positif terhadap PDRB daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian didukung dengan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara, maka jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agustina (2013) dan Larengkum (2014) Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahayu (2011), Agustina (2013) dan Larengkum (2014) yang menemukan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah yang dikelola daerah dengan baik. Maka daerah akan mampu membiayai pengeluaran pemerintah yang meliputi belanja operasional dan belanja modal. Dalam pembahasan sebelumnya alokasi belanja pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan lebih besar untuk belanja operasional. Oleh karena itu dalam rangka memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari peningkatan PDRB, pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih fokus dalam mengalokasikan

anggaran untuk pos belanja modal. Dimana belanja modal merupakan jenis belanja untuk kegiatan pembangunan berbagai fasilitas publik yang bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

*b. Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap PDRB*

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB. Terlihat dari nilai  $t$ -hitung = 1,192 serta nilai signifikan 0,544 dan  $t$ -tabel = 1,317, maka  $t$ -hitung <  $t$ -tabel (1,192 < 1,317). berarti variabel kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian hipotesis tidak terbukti.

Hal tersebut diakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Pendapatan daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dominan bersumber dari dana transfer dibandingkan PAD. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan dari PAD. Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan lebih memaksimalkan sektor-sektor ekonomi potensial untuk meningkatkan PAD.

Kemandirian keuangan daerah yang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain untuk mendorong pemerintah daerah menjadi mandiri secara finansial atau harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD, karena kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, efektivitas pertumbuhan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan belanja daerah maka semakin tinggi pula PDRB. Hasil penelitian ini didukung dengan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara, maka jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap perekonomian daerah.





Kedua, kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Terlihat dari Pendapatan daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dominan bersumber dari dana transfer dibandingkan PAD. Dengan kata lain ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan dari PAD.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran. Pertama, Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan perlu lebih berusaha meningkatkan PAD melalui: (1) Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran. (2) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan (3) Mengadakan pendekatan yang persuasive kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan dan lain sebagainya. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam perkembangan APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD sehingga akan lebih lengkap..

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim peneliti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat karena telah mengamanahkan untuk melaksanakan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini sepenuhnya dibiayai dari dana PNBPF Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar melalui DIPA Universitas Negeri Makassar nomor: SPDIPA – 023.17:2.677523/2022, tanggal 27 Juli 2022 Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar nomor: 567/UN36/HK/2022 tanggal 8 April 2022 dengan kontrak nomor 762/UN36.11/LP2M/2022.

### **REFERENSI**

- Agustina, Melasia. 2013. Pengaruh Otonomi Daerah, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2012. Universitas Udayana. Bali.
- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Rafika Aditama.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2013*. Makassar.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat



- Hanafi, Imam & Mugroho, Trilaksono. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Pers.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban & Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatasaha Keuangan Daerah & Penyusunan Perhitungan APBD
- Larengkum, Dirgahayu. 2014. Pengaruh APBD terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud. Universitas Samratulangi. Manado.
- Marizka, Addina. 2009. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Mone, Indah Yuliani. 2013. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Pangkep. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Najiah, Leni. 2013. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan & Tingkat Partisipasi Anglatan Kerja terhadap PDRB di Kota Depok Periode 2001-2010.
- Nataluddin. 2001. Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN
- Nordiawan, Deddi. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Mafizatun. 2015. Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Universitas Mercu Buana. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Fokusmedia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Prasetya, Ferry. 2012. Modul Ekonomi Publik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang
- Pratini. 2014. Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Universitas Tanjungpura.



**SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN 2022**

*"Membangun Negeri dengan Inovasi tiada Henti Melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat"*

LP2M-Universitas Negeri Makassar

- Rahayu, Sri Endang. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah. Sumatera Utara.
- Saputra, Budi. 2015. Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Universitas Jambi. Jambi.
- Tarigan, Rabinson. 2012. Ekonomi Regional. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPPYKPN.